

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR:  
3349/Pdt.G/2009/PA.Sby OLEH PENGADILAN TINGGI  
AGAMA SURABAYA NOMOR: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby  
MENGENAI HAK ASUH ANAK**

**SKRIPSI**



**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 107 45	No. REG : 5.2011/45/107 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Oleh:**

**AMA' KHISBUL MAULANA  
C5 1207008**

**Institut Agama Islam Negeri Surabaya  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ama' Khisbul Maulana  
NIM : C51207008  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal as-Syahiyyah  
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan  
Pengadilan Agama Surabaya Nomor:  
3349/Pdt.G/2009/PA.Sby Oleh Pengadilan Tinggi  
Agama Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby  
Mengenai Hak Asuh Anak

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

Yang membuat pernyataan,



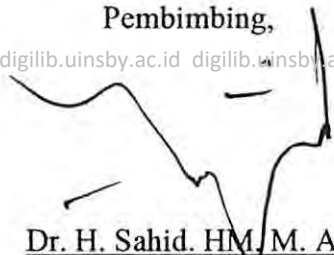
Ama' Khisbul Maulana  
C51207008

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Ama' Khisbul Maulana ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing,



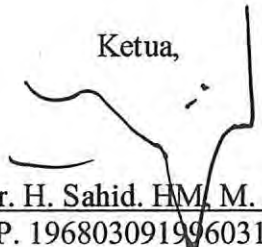
Dr. H. Sahid. HM. M. Ag  
NIP. 196803091996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ama' Khisbul Maulana ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Ketua,

  
Dr. H. Sahid. HM, M. Ag  
NIP. 196803091996031002


Sekretaris,

  
RA Vidia Gati, SE, Ak, MEI  
NIP. 197605102007012030


Penguji I,

  
Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag  
196506151991021001

Penguji II,

  
Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M. Ag  
NIP. 197904162006042002

Pembimbing,

  
Dr. H. Sahid. HM, M. Ag  
NIP. 196803091996031002

Surabaya, 12 Agustus 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag  
NIP. 195005201982031002



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim PA Surabaya dalam putusan Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby? bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim PTA surabaya dalam putusan Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan PTA surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan serta didukung data lapangan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam putusan Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby, Pengadilan Agama Surabaya menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, dengan mendasar pada pasal 105 KHI dan pertimbangan bahwa ibu lebih dekat dengan anak dan tidak terbukti bahwa ibu mempunyai kelakuan buruk dan *fāsiq*. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby berpendapat lain dengan membatalkan putusan PA Surabaya dan memberikan hak asuh anak kepada bapak. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak yang lebih bisa terjamin jika tinggal bersama bapak, dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA Surabaya dan sekaligus menetapkan bapak sebagai pemegang hak asuh anak adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam mengambil keputusan majelis hakim PTA Surabaya kurang memperhatikan kedekatan hubungan antara ibu dan anak, serta kondisi ibu yang dalam hukum Islam telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh anak. Selain itu majelis hakim kurang bisa memahami pentingnya peran *ḥādīn* terhadap kemaslahatan *maḥdūn*.

Dari kesimpulan tersebut, hendaknya majelis hakim lebih teliti lagi dalam mengkaji dan mempertimbangkan semua aspek yang tercakup dalam permasalahan *ḥadānah*, sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan, khususnya kemaslahatan anak. Serta bagi kedua orang tua seharusnya memahami bahwa pengasuhan semata-mata dilakukan demi kepentingan dan masa depan anak, agar tidak ada lagi perebutan hak asuh anak dan juga tidak ada lagi kepentingan anak yang terabaikan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
F. Kajian Pustaka .....	13
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	20

## BAB II HUKUM ISLAM TENTANG *ḤADĀNAH*

A. Pengertian <i>Ḥadānah</i> .....	22
B. Dasar Hukum <i>Ḥadānah</i> .....	25
C. Syarat-syarat <i>Ḥadānah</i> .....	30
D. Urutan Pemegang <i>Ḥadānah</i> .....	39
E. Berakhirnya Masa <i>Ḥadānah</i> .....	43

## BAB III PUTUSAN PA SURABAYA dan PTA SURABAYA MENGENAI HAK ASUH ANAK

A. Deskripsi Perkara Dalam Putusan PA Surabaya.....	47
1. Duduk Perkara.....	47
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim.....	50
3. Putusan Pengadilan .....	52
B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan PTA Surabaya .....	52
1. Duduk Perkara .....	52
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim.....	53
3. Putusan Pengadilan .....	56

## BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA SURABAYA NOMOR: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby dan PTA SURABAYA NOMOR: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby.....	58
B. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Putusan PTA Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby .....	62
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby oleh PTA Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak ...	66

## **BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
---------------------	----

B. Saran .....	73
----------------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BIODATA PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu subsistem kehidupan beragama, yang merupakan sebuah proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih besar. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat *Yāsīn* ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ .

*"Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), 710



Dalam firman-Nya juga surat *Az-Zāriyāt* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.*<sup>3</sup>

Persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, di Negara Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Adapun aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Disamping itu, dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

<sup>3</sup> *Ibid.*, 862

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sangat kuat atau *Misāqan Galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menuliskan bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>7</sup> Allah SWT berfirman dalam surat *an-Nisā'* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>8</sup>

Memiliki sebuah Keluarga yang penuh kebahagiaan merupakan dambaan setiap manusia. Akan tetapi, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahfahaman dan perbedaan pendapat antara suami istri sangatlah besar, yang terkadang hal tersebut menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga dapat

<sup>6</sup> Pasal 2 Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II (Al-Qāhirah: Dār al-Fath al-I'lam al-Arabiyy, 1990), 121

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 114

menyebabkan perceraian yang lebih besar dan meluas di antara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu.

Untuk menjaga hubungan keluarga agar tidak terlalu rusak dan berpecah-belah, agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara keluarga kedua belah pihak dan juga dengan sekeliling tetap berjalan dengan baik. Meskipun begitu, perlu dinyatakan bahwa dengan mensyariatkan perceraian dalam suatu perkawinan, bukan berarti bahwa agama Islam menyukainya.<sup>9</sup> Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW.:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

*“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah ṭalāq.”*<sup>10</sup>

Agama Islam menghendaki dilakukannya perceraian hanya jika sebuah rumah tangga benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa diselamatkan. Jadi walaupun menemui masalah yang terlampau besar dan sulit untuk menemukan jalan keluarnya, sebisa mungkin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena bagaimanapun perceraian akan membawa dampak psikologis terhadap

<sup>9</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), 158

<sup>10</sup> Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1996), 120

anak dan keluarga. Jalan keluar dengan berpisah merupakan solusi yang paling terakhir.<sup>11</sup>

Namun demikian, terjadinya sebuah perceraian bukan berarti mengakibatkan hilangnya semua kewajiban dan tanggung jawab antara mantan suami dan istri. Masih banyak hal yang harus difikirkan pascaperceraian, termasuk salah satunya yang harus lebih diperhatikan adalah masalah pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*), yang sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, meliputi masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.<sup>12</sup>

Menurut para ulama fikih, *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>13</sup> Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti makan, berpakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya harus

---

164 <sup>11</sup> Yusuf Chudrori, *Baity Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009),

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 235

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 176

mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak tersebut menjadi anak yang baik di kemudian hari, serta harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas-tugas tersebut.<sup>14</sup>

Hal ini menjadi peringatan bagi pasangan suami-istri yang telah bercerai, bahwa mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sebagaimana Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian yang terjadi hendaknya jangan sampai memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa apabila kedua orang tua si anak masih hidup, maka yang paling berhak melakukan *ḥaḍānah* atas anak adalah ibu, selama belum menikah lagi (dengan laki-laki lain). Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang masih kecil, seorang anak lebih membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang.<sup>15</sup>

Selain alasan tersebut, para ulama mendasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abū Dāwud dan Bayhaqiy, serta disahkan oleh Hākim:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 177

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 329



حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمِ تَنْكَحِي .

*“Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhanku yang mengawasinya dan air susuku yang minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum kawin (dengan laki-laki yang lain)”.*<sup>16</sup>

Dari hadis tersebut telah jelas bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *haḍānah*, yaitu dengan syarat belum menikah lagi.

Namun demikian, meskipun anak berada dalam asuhan ibu, segala biaya yang

diperlukan untuk kehidupan anak tetap berada di bawah tanggung jawab seorang ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati para ulama.<sup>17</sup> Dalam

KHI Pasal 105 juga disebutkan bahwa:

#### Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 105 tersebut disebutkan bahwa ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Meskipun

<sup>16</sup> Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, 150

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 329

<sup>18</sup> Pasal 105 Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Kompilasi Hukum Islam

pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian oleh ibu, namun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian. Apabila anak sudah *mumayyiz*, maka anak disuruh memilih kepada siapa di antara ayah dan ibunya dia akan ikut.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menganalisis sebuah kasus tentang gugatan cerai yang dalam petitumnya meliputi gugatan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di PA Surabaya yaitu perkara No. 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak. Dari gugatan tersebut majelis hakim PA surabaya memutuskan jatuhnya *Ṭalāq bā'in ṣugrā* dari tergugat (suami) terhadap penggugat (istri) dan menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat. Dalam hal ini, hakim PA Surabaya berpedoman pada ketentuan KHI pasal 105, bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan tingkat pertama karena merasa haknya terserang oleh adanya putusan tersebut atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan terhadap perkara yang telah diputuskan kepada Pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang. Upaya permohonan ini disebut sebagai upaya banding.<sup>19</sup> Demikian juga

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 196

dalam perkara ini, suami merasa putusan hakim PA Surabaya tidak adil dan tidak sesuai dengan pertimbangan kondisi yang ada. Maka, kemudian suami mengajukan banding ke PTA Surabaya dan mengajukan memori banding yang pada intinya adalah keberatan atas putusan PA Surabaya. Akhirnya setelah membaca, memeriksa, meneliti berita acara perkara, majelis hakim PTA tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan mengadili sendiri majelis hakim PTA membatalkan putusan PA Surabaya untuk sebagian dan memutuskan hak asuh anak diserahkan kepada pembanding (tergugat), dengan pertimbangan bahwa anak pembanding dan terbanding sudah berada dalam penguasaan pembanding sejak 1 bulan sebelum pengajuan banding, dan selama berada dalam penguasaannya tersebut tidak ternyata kepentingan anak terabaikan. Dari segi pemenuhan kewajiban bapak kepada anak berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak secara langsung dapat terpenuhi sesuai tingkat kebutuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara proporsional. Dalam hal ini majelis hakim PTA mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak".

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis alasan-alasan dan dasar hukum yang digunakan PA Surabaya dalam menyelesaikan perkara Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang hak asuh anak dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim PTA Surabaya dalam perkara Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby untuk membatalkan putusan PA Surabaya. Permasalahan tersebut akan penulis bahas secara khusus pada skripsi ini, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz*
2. Dasar hukum hak asuh anak yang belum *mumayyiz*
3. Kemaslahatan anak dalam *ḥaḍānah*
4. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam putusan Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby
5. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby

6. Analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada tiga batasan masalah:

1. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby
2. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby
3. Analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### C. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim PA Surabaya dalam putusan Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby?
2. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim PTA surabaya dalam putusan Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan PTA surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis, yaitu sebagai kajian ilmiah hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan umumnya bagi seluruh civitas akademika yang tertarik untuk

menelaah dan mengkaji lebih jauh hukum keluarga Islam mengenai *ḥaḍānah* (hak asuh anak) terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>20</sup>

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah hak asuh anak. Skripsi ini bukanlah karya tulis pertama yang membahas hak asuh anak, tetapi telah dibahas sebelumnya. Hal ini terbukti dengan setidaknya terdapat tiga dari beberapa penulis skripsi yang menjadikan hak asuh anak sebagai obyek penelitian, di antaranya:

1. Muhammad Syaikhon<sup>21</sup> dalam skripsinya membahas tentang hak asuh anak yang oleh putusan pengadilan tingkat pertama diberikan kepada ayah. Akan tetapi kemudian pada tingkat banding, PTA membatalkan putusan tersebut dengan alasan gugatan penggugat/terbanding dianggap tidak memenuhi

<sup>20</sup> Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h.7

<sup>21</sup> Muhammad Syaikhon, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Jatim dalam Perkara Hak Asuh Anak* (Skripsi pada Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

hukum formil, yaitu dalil gugatan penggugat tidak jelas, dan memberikan hak asuh anak kepada pihak ibu.

2. Ahmad Abdul Salam,<sup>22</sup> membahas tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dimana diberikan kepada pihak isteri (ibu) oleh PTA Surabaya tanpa memperhatikan domisili ayah yang bertempat tinggal di Bekasi dan ibu yang bertempat tinggal di Surabaya, akan tetapi yang dititikberatkan adalah terciptanya kesejahteraan anak.
3. Lis Chamidah<sup>23</sup>, dalam skripsinya membahas tentang hak *ḥaḍānah* yang diberikan kepada ibu oleh PTA dengan pertimbangan berdasar pada kenyataan bahwa anak belum *mumayyiz*. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan pada PA gresik dan PTA Surabaya.

Adapun fokus pembahasan pada skripsi ini berbeda dari ketiga skripsi di atas, meski ada kesamaan tentang perkara hak asuh anak, namun fokus pembahasan penulis adalah mengenai pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam perkara nomor : 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang memberikan hak asuh anak kepada suami (ayah) dan membatalkan putusan PA Surabaya nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby, dengan alasan anak sudah tinggal bersama ayah

---

<sup>22</sup> Ahmad Abdul Salam, *Studi Analisis Madzhab Syafi'i Terhadap Putusan PTA No. 196/Pdt.G/2006/PTA Surabaya Tentang Perbedaan Domisili Mengenai Hak Asuh Anak* (Skripsi pada Jurusan Ahwal as-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007)

<sup>23</sup> Lis Chamidah, *Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding; Studi Kasus di PA Gresik* (Skripsi pada Jurusan Ahwal as-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003)

selama kurang lebih satu bulan, dan hakim memandang bahwa anak sudah tercukupi kebutuhannya.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan secara terperinci maksud dari judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby Oleh PTA Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby dalam Perkara Hak Asuh Anak”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya.
2. Hukum Islam : Hukum-hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab fikih yang membahas tentang hak asuh anak (*Ḥaḍānah*)
3. Putusan : kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>24</sup> Dalam hal ini putusan yang dimaksud yaitu putusan PA

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 292

Surabaya dalam perkara Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby dan putusan PTA

Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

4. Hak asuh anak : Penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang dibawah umur, dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsung sampai anak itu mumayyiz (dapat membedakan baik-buruk).<sup>25</sup> Dalam hal ini yang dimaksud yaitu anak perempuan yang masih berumur 4 (empat) tahun, sebagaimana yang terdapat dalam putusan.

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak” adalah menganalisa putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang hak asuh anak dengan perspektif hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah *Qualitative Research*.

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 334



## 1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang hak asuh anak yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
- b. Pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
- c. Hasil wawancara dengan hakim PTA Surabaya yang bersangkutan, mengenai hak asuh anak.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa salinan putusan di Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan

harian lainnya.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder berupa informasi dari responden, yaitu hakim PTA Surabaya dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

1. *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq,
2. *Fiqh Keluarga* karya Ali Yusuf as-Subki,
3. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin,
4. *Kompilasi Hukum Islam*,
5. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
6. *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali,
7. *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd
8. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* karya Kamal Muhtar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder dan Undang-Undang terbaru yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.
- b. Wawancara (*Interview*), adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi,

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115

yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.<sup>27</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Drs. Thanthowie Ghanie, SH. MH. selaku hakim PTA Surabaya.

#### 4. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Surabaya dan PTA Surabaya dalam hak asuh Anak, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara hak asuh anak, dalil-dalil *naşş*, dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari

---

<sup>27</sup> S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113

hasil riset terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Surabaya tentang perkara hak asuh anak, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan subbab-subbab tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi.

Bab pertama diawali dengan Pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan landasan teoritis yang berisi hukum Islam tentang *ḥaḍānah* yang meliputi pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, urutan pemegang *ḥaḍānah*, dan berakhirnya masa *ḥaḍānah*.

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi deskripsi kasus tentang sengketa hak asuh anak, pertimbangan dan dasar hukum hakim PA Surabaya dan putusan perkara hak asuh anak Nomor:

3349/Pdt.G/2009/PA.Sby, serta pertimbangan dan dasar hukum hakim PTA Surabaya dan putusan perkara hak asuh anak Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi analisis terhadap dasar hukum dan putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby dalam perkara Hak Asuh Anak, analisis terhadap dasar hukum dan putusan PTA Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Surabaya, dan analisis hukum Islam terhadap putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby dan PTA Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### HUKUM ISLAM TENTANG *HADĀNAH*

#### A. Definisi *Hadānah*

Dalam istilah *fiqh* digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafālah* dan *hadānah*. Yang dimaksud *kafālah* dan *hadānah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.<sup>1</sup> Secara etimologi, *hadānah* berasal dari kata “*hidan*” yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Hadana at-Tā’ir baiḍahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepat dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.<sup>2</sup> *Hadānah* dengan kasrah huruf ha adalah masdar dari kata “*hadana*” misalnya “*hadana sabiyya*” yaitu (Dia mengasuh dan memelihara bayi).<sup>3</sup>

Kata “*al-Hiḍn*” juga bisa berarti rusuk. Kemudian perkataan *hadānah* dipakai dalam istilah dengan arti pengasuhan anak, karena seorang ibu yang

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 327

<sup>2</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah Abdul Ghofar, Cet. 24, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 454

<sup>3</sup> As-Shan'ani, *Terjemahan Subulu al-Salām*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad. Jilid III, (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), 819.



mengasuh atau menggendong anaknya yang masih kecil sering menyusukan anaknya meletakkannya di atas pangkuan di sebelah rusuknya.<sup>4</sup>

Secara terminologi, dalam kitab *Fathul Qarib* disebutkan bahwa *ḥaḍānah* adalah penjagaan seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri untuk mengurus pekerjaannya dari sesuatu karena tidak ada kepandaian (pada dirinya), seperti anak kecil dan orang tua yang gila.<sup>5</sup> Senada dengan definisi tersebut, *Wahbah az-Zuhailiy* dalam bukunya *al-Fiqhu al-Islāmiy Wa 'Adillatuhu* menjelaskan bahwa *ḥaḍānah* adalah mendidik dan menjaga anak yang belum *mumayyiz* atau orang dewasa yang kehilangan kecerdasannya dan tidak bisa mengatur urusannya sendiri dari sesuatu yang bisa menyakitinya.<sup>6</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Hamdani dalam bukunya *Risalah Nikah* mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akalanya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), 137

<sup>5</sup> *Fathul Qarib*, Jilid II, Penerjemah Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1984), 104

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqhu al-Islāmiy wa 'Adillatuhu*, Juz X, (Damaskus, Dār al-Fikr, 1997), 7295-7296

<sup>7</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318

Secara lebih lengkap para ahli fiqih mendefinisikan *ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dan menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>8</sup>

*Ḥaḍānah* berbeda maksudnya dengan *tarbiyah* (pendidikan). Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Karena *ḥaḍānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga, maka bisa dilakukan oleh setiap ibu dan anggota kerabat lain.<sup>9</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>10</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan anak berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 176

<sup>9</sup> *Ibid*, 176

<sup>10</sup> Pasal 1 Huruf (g) Bab I Tentang Ketentuan Umum, Kompilasi Hukum Islam

anak tersebut berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>11</sup>

Dari beberapa uraian definisi tersebut, secara lebih khusus dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* ialah kegiatan memelihara, mengasuh serta mendidik anak yang belum *mumayyiz*, meliputi jasmani, rohani, maupun akalunya, sampai si anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.

## B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup dari orang tuanya. Cita-cita dan usaha-usaha yang tidak sanggup orang tua melaksanakannya, diharapkan agar anaknya nanti yang melanjutkannya. Anak yang saleh merupakan amal bagi orang tuanya. Hanya do'a anak yang salehlah yang dapat meringankan orang tua yang telah meninggal dunia dari siksaan Allah.<sup>12</sup> Sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam *ḥadīṣ* beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak keturunan adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amal daripadanya*

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 294

<sup>12</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 138

*kecuali dari tiga perkara: sadaqah jāriyyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendo'akannya”.*<sup>13</sup>

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib, sebagaimana kewajiban orang tua untuk memeliharanya selama dalam ikatan perkawinan.<sup>14</sup> Memelihara anak adalah tanggung jawab bersama, ibu dan ayah, karena anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.<sup>15</sup> Apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.<sup>16</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat *al-Tahrim* ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraishy an-Naisāburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, (Dahlan: Indonesia, tt.), 1255

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 328

<sup>15</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 318

<sup>16</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 415

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), 820

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. *Ḥaḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.<sup>18</sup> Dalam kaitan ini, terutama ibunya adalah yang berkewajiban melakukan *ḥaḍānah*. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang masih kecil, seorang anak lebih membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang.<sup>19</sup>

Selain alasan tersebut, para ulama mendasarkan pada *ḥadīṣ* Nabi yang diriwayatkan oleh *Ahmad*, *Abū Dāwud* dan *Bayḥaqiy*, serta disahkan oleh *Hākim*:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْنِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَتَيْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي .

“Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhanku yang mengawasinya dan air susuku yang minumannya. Ayahnya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum kawin (dengan laki-laki yang lain).”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 217

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 329

<sup>20</sup> Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1996),

Dari *ḥadīṣ* tersebut telah jelas bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *ḥaḍānah*, yaitu dengan syarat belum menikah lagi. Namun demikian, meskipun anak berada dalam asuhan ibu, segala biaya yang diperlukan untuk kehidupan anak tetap berada di bawah tanggung jawab seorang ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati para ulama.<sup>21</sup>

Islam mewajibkan ayah memberi nafkah kepada anak selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Menyia-nyiakan anak, meninggalkan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka termasuk dari dosa-dosa besar yang tidak patut bagi seorang muslim.<sup>22</sup>

Selain dari ayat di atas, para fuqaha<sup>23</sup> mendasarkan hukum *ḥaḍānah* pada

surat *al-Baqarah* (2) ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum*

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 329

<sup>22</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 283



*dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>23</sup> (surat *al-Baqarah*: 233)

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu, melekat di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.<sup>24</sup> Dalam Pasal 105 KHI juga digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id disebutkan:

#### Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 105 tersebut disebutkan bahwa ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian oleh ibu, namun biaya

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 237

<sup>25</sup> Pasal 105 Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Kompilasi Hukum Islam

pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian. Apabila anak sudah *mumayyiz*, maka anak disuruh memilih kepada siapa di antara ayah dan ibunya dia akan ikut.

Selain diatur dalam KHI, permasalahan *ḥaḍānah* juga diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan:

#### Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>26</sup>

### C. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

*Ḥaḍānah* itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang yang mengasuh yang disebut *ḥāḍin* dan anak yang diasuh atau *maḥḍūn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu.

<sup>26</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.<sup>27</sup>

Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai *kafā'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan *kafā'ah* mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.<sup>28</sup> Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilaksanakannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berfikir sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk juga tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Jika diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini adalah

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 328

<sup>28</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 321

*fāsiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

5. Tidak terikat dalam suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥadānah* dengan baik.<sup>29</sup> seperti *ḥādīn* terikat dengan pekerjaan yang jauh tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya untuk bekerja, karena hal itu akan menyebabkan kurangnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak.
6. Tidak membenci si anak.<sup>30</sup> Jika *ḥādīn* membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan, sebab yang penting dalam *ḥadānah* ialah *ḥādīn* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya.
7. Sanggup melaksanakan pengasuhan anak. Yang dimaksud dengan kesanggupan dalam hal ini bukanlah kesanggupan dengan arti keahlian, tetapi kesanggupan dalam arti adanya kemampuan pengasuh untuk menjadikan anak asuhnya sebagai muslim dan berpendidikan, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.<sup>31</sup>

Hasan Al-Baṣri mengatakan, aku mendengar guru kita berkata: “telah terjadi perselisihan antara kedua orang tua atas anak, menurut sebagian hakim memilihkan anak antara kedua orang tuanya, maka dipilih bapaknya,

---

<sup>29</sup> Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, 181

<sup>30</sup> *Ibid.*, 182

<sup>31</sup> Kamal muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 143

ibunya berkata: aku menanyakannya kenapa ia memilih bapaknya?, lalu ditanyainya, anak kecil itu berkata: ibuku membawaku ke kuttab setiap hari dan ahli fiqh memukulku, sedangkan bapakku meninggalkanku bermain bersama anak-anak. Maka diputuskan untuk memilih ibu, ia berkata: engkau lebih berhak atasnya”.<sup>32</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin sebagaimana dalam buku *Terjemah Fiqh Islam Lengkap*, syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh anak adalah berakal, merdeka, Islam, kasih sayang, jujur, tidak bersuami, dan bertempat tinggal.<sup>33</sup> Sedangkan *Sayyid Sābiq* dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh anak ialah:<sup>34</sup>

1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *ḥaḍānah* karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri.
2. Dewasa. Sekalipun anak kecil itu *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik. Karena itu, orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil.

<sup>32</sup> Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād fī ḥudā khair al-'Ibād*, (Kairo: Muhammad Ali ṣābiḥ al-Qāhirah, tt.), 122

<sup>33</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 258-260

<sup>34</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, 439-442





4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
5. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena *ḥadānah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعُكُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

*“(yaitu) Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?” dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.*<sup>35</sup> (An-Nisā’: 141)

Menurut Imamiyyah dan Syāfi’i seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam, dan ulama’ *mazhab* Hanafiy mengatakan bahwa

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 146



kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.<sup>36</sup> Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ وَيَمَجْسَانِهِ, فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ .

*“Tiap-tiap orang yang dilahirkan oleh ibunya atas dasar fitrah beragama (Islam), maka tergantung ayah dan ibunya yang mendidik dia menjadi orang yang beragama yahudi, nasrani atau majusi. Maka bilamana kedua orang tuanya muslim, jadilah anaknya muslim”.*<sup>37</sup>

6. Ibunya belum kawin lagi. Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hak *ḥaḍānah*-nya hilang. Hal ini berdasarkan *ḥadīṣ* Nabi SAW:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتُدْنِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي .

*“Abdullah bin Amr berkata bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”.*<sup>38</sup>

<sup>36</sup> M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Muhammad Afif, (Jakarta: Lentera, 2008), 135

<sup>37</sup> Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraishy an-Naisāburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, (Dahlan, Indonesia, tt.), 2048

<sup>38</sup> Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, 150

7. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Adapun syarat anak yang akan diasuh (*mahḍūn*) itu adalah:<sup>39</sup>

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapa pun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketatnya persyaratan bagi seorang *ḥāḍin* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa peran seorang *ḥāḍin* sangatlah penting terhadap perkembangan dan kehidupan anak. Hal ini didasarkan pada kesimpulan analisa para ulama bahwa pada hakekatnya fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anak ada dua macam, yaitu:

1. Fungsi Orang Tua Sebagai Pengayom

Sebagai konsekuensi bagi orang yang berani berkeluarga adalah bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh keluarga, termasuk anak-anak yang ada di dalamnya.<sup>40</sup> Dalam surat *aṭ-Ṭalāq* ayat 6 Allah berfirman:

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 329

<sup>40</sup> Musthafa Kamal Pasha, Dkk, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 301

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى .

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>41</sup>

Dari kedua pedoman di atas dapat di tarik pengertian bahwa tanggung jawab orang tua terhadap keluarga yang pertama adalah tanggung jawab mengayomi dan melindungi mereka sehingga akan tercukupi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan mereka, serta tercipta satu kehidupan yang damai bahagia, jauh dari berbagai macam tekanan dan penderitaan batin. Orang tua wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya sehingga terwujud kehidupan yang penuh dengan suasana kasih sayang, kehidupan yang senantiasa diwarnai dengan sikap asah, asih dan asuh.<sup>42</sup>

## 2. Fungsi Orang Tua Sebagai Pendidik

Fungsi kedua ini juga mempunyai arti penting, selain orang tua selaku pengayom. Hal ini terkandung dalam surat *at-Tahrim* ayat 6 sebagaimana

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 819

<sup>42</sup> *Ibid.*, 301

disebutkan di atas yang menjadi dasar hukum kewajiban *ḥaḍānah*, yang secara tersirat lebih menekankan kepada orang tua dalam peranannya sebagai pendidik. Perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka dapat diartikan sebagai perintah untuk berusaha secara optimal dengan mempergunakan berbagai upaya dengan mempengaruhi dan membimbing keluarga termasuk anak agar memiliki kepribadian yang teguh dan penuh tanggung jawab.<sup>43</sup> Dalam sebuah tulisannya Imām Ḡazaliy sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Kamal Dkk. Dalam buku *Fikih Islam*, dinyatakan sebagai berikut:

*“Melatih anak-anak adalah suatu hal yang sangat penting sekali, karena anak sebagai amanat bagi orang tuanya. Hati anak suci bagaikan mutiara cenerlang, bersih dari segala ukiran dan gambaran. Ia akan dapat mampu menerima segala yang diukirkan atasnya dan condong kepada segala yang dicondongkan kepadanya. Maka apabila ia dibiasakan ke arah kebaikan dan diajarkan kebaikan, jadilah ia baik dan berbahagialah ia dunia akhirat, sedang ayah dan para pendidiknya ikut serta mendapatkan bagian pahalanya. Akan tetapi bilamana dibiasakan jelek atau dibiarkan dalam kejelekan maka celaka dan rusaklah ia, sedang wali serta pemelihara lainnya mendapatkan beban dosanya. Untuk itu wajibah wali menjaga anak dari perbuatan dosa dengan jalan mendidik dan mengajar berakhlak mulia, menjaganya dari pergaulan teman-temannya yang berperangai jahat dan tidak boleh membiasakan anak-anak dengan bernikmat-nikmat (berfoya-foya).”<sup>44</sup>*

Dari uraian di atas cukup jelas bahwa menurut ajaran Islam peranan orang tua dalam mendidik anak tidak hanya sekedar prakarsa manasuka, akan tetapi benar-benar merupakan kewajiban agama yang mutlak harus

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 301

<sup>44</sup> *Ibid.*, 302

ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Mendidik anak adalah sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, sebagaimana yang tersirat dalam sebuah *ḥadīṣ* Rasulullah SAW sebagai berikut:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

*“Ingatlah masing-masing dari kalian itu menjadi penggembala, dan masing-masing dari kalian (harus) bertanggung jawab atas gembalaannya”.*<sup>45</sup>

#### D. Urutan Pemegang *Ḥaḍānah*

Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid* disebutkan, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Jumhur *fuqahā'* berpendapat bahwa *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* itu diberikan kepada ibu. Ibu mendapat prioritas utama dalam hak *ḥaḍānah*.<sup>46</sup> Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat”.*<sup>47</sup>

Hal ini juga didasarkan pada perumpamaan seorang hamba perempuan dan perempuan tawanan yang tidak boleh dipisahkan dari anaknya, maka

<sup>45</sup> Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisy an-Naisāburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, 1459

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 526

<sup>47</sup> Abu 'Isa Muhammad bin Surah at-Tirmiziy, *Sunan Tirmiziy*, Juz III, (Semarang: Toha Putra, tt.), 376

terlebih lagi bagi perempuan yang merdeka.<sup>48</sup> Selain itu *Abū Bakar as-Siddīq* juga pernah menyatakan bahwa: “Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya”.<sup>49</sup>

Senada dengan hal tersebut, menurut KH. MA. Sahal Mahfudh ibu lebih berhak memelihara anak, dengan pertimbangan kasih sayang ibu (*‘Aṭifah al-Ummah*) pada umumnya lebih besar dari ayah. Hubungan batin ibu dengan anak lebih kuat. Anak membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dan hanya dimiliki ibu. Perempuan juga lebih sabar dan lembut sehingga lebih sesuai untuk melakukan tugas mengasuh dan merawat anak.<sup>50</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila asuhan terhadap anak dimulai dari ibu, maka para *fuqahā’* berkesimpulan bahwa kerabat dari ibu lebih berhak mengasuh daripada kerabat pihak ayahnya. Urutan yang berhak mengasuh anak harus mengikuti tertib sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Ibu. Apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada:

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 526

<sup>49</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 297

<sup>50</sup> Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya: Khalista, 2010), 281

<sup>51</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 319-320



2. Nenek (ibu dari ibu si anak). karena merupakan orang yang lebih banyak kasih sayangnya kepada anak kecil itu sesudah ibunya, kemudian ibunya nenek,
3. Nenek yaitu ibunya bapak, ia datang sesudah ibunya ibu, sekalipun ke atas peringkatnya, kemudian ibunya seibu bapak, dan ibunya lagi, sekaligus ke atas.
4. Saudara perempuan seibu-sebapak, kemudian saudara perempuan seibu, ia didahulukan atas nama saudara perempuan sebapak,
5. Saudara perempuan seibu-sebapak atau saudara kandung dengan si anak.
6. Saudara perempuan seibu dengan ibu si anak.
7. Saudara perempuan seayah.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
9. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu dengan ibu si anak.
10. *Khalah* (bibi, saudara perempuan ibu) yang sekandung dengan ibu
11. Khalah seibu.
12. *Khālah* seayah.
13. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
16. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
17. *‘Ammah* seibu.

18. '*Ammah* seayah.
19. *Khālah*-nya ibu.
20. *Khālah*-nya ayah.
21. '*Ammah*-nya ibu.
22. '*Ammah*-nya ayah. Dan seterusnya dengan mendahulukan kerabat yang sekandung.

Dalam hal ibu yang melepaskan haknya atau terhalang untuk untuk memperoleh haknya, para ulama berbeda pendapat mengenai kepada siapa hak *ḥaḍānah* itu beralih. Sebagian ulama berpendapat hak *ḥaḍānah* berpindah ke ayah, karena nenek (ibu dari ibu) merupakan cabang, sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua yang dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan haknya, maka hak tersebut berpindah kepada ibunya ibu, karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya.<sup>52</sup>

Adapun dalam KHI Pasal 156 (a) disebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

---

<sup>52</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 332

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah.<sup>53</sup>

#### E. Berakhirnya Masa *Ḥaḍānah*

Asuhan terhadap anak berakhir seorang apabila anak tidak memerlukan lagi pelayanan seorang ibu, sudah *bālig* atau sudah dapat melayani keperluannya sendiri, dapat makan, mandi dan berpakaian sendiri. Karena itu, tidak ada batasan waktu tertentu untuk menetapkan berakhirnya masa mengasuh anak, ukurannya adalah masa *mumayyiz*. Apabila anak sudah dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak memerlukan rawatan ibu berarti selesailah masa *ḥaḍānah* itu.

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 KHI huruf (a) dan (b), yaitu: “(a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”.<sup>54</sup>

Pada dasarnya dalam al-Qur'an maupun *ḥadīṣ* tidak terdapat keterangan yang menerangkan dengan tegas tentang masa *ḥaḍānah*, hanya terdapat isyarat-

<sup>53</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Perceraian

<sup>54</sup> Pasal 105 Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Kompilasi Hukum Islam

isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh sebab itu para fuqaha' berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat tersebut. Mereka hanya sepakat menyatakan bahwa pengasuhan itu dimulai semenjak anak lahir sampai ia *mumayyiz*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kapan berakhirnya *ḥaḍānah* tersebut. Para *fuqahā'* menetapkan masa pengasuhan itu berdasarkan isyarat-isyarat *ḥadīṣ* Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seorang wanita yang mengadukan bahwa anaknya yang masih kecil akan diambil oleh bekas suaminya: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain". Dan anjuran Rasulullah SAW agar orang tua menyuruh anak-anaknya yang telah berumur enam atau tujuh tahun mengerjakan sembahyang. Apabila telah berumur sembilan tahun, setelah disuruh tidak mau mengerjakan sembahyang, maka anak itu telah boleh dipaksa dengan memukulnya.<sup>55</sup>

Dalam kitab *I'ānatut Ṭālibīn* sebagaimana yang dikutip oleh Moch. Anwar dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, dijelaskan bahwa "Apabila suami-istri bercerai dan mempunyai anak kecil, maka ibunya lebih berhak memeliharanya sampai usia tujuh tahun, setelah itu anak disuruh memilih antara mengikuti ibunya terus atau pindah ke bapaknya, kepada siapa saja ia memilih harus dituruti".<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Kamal muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 145-146

<sup>56</sup> Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 129

Ulama' *māzhab Ḥanafiy* berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki akan berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian dan membersihkan diri. Anak seperti ini menurut mereka biasanya telah berumur tujuh tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada para orang tua untuk menyuruh anak mereka shalat apabila telah berusia tujuh tahun. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah *bālig* yang ditandai dengan haid sekitar berusia sembilan tahun.<sup>57</sup>

Sedangkan menurut *māzhab Syāfi'iy* berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya.<sup>58</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka para *fuqahā'* pada umumnya membagi masa *ḥadānah* itu pada dua masa:

---

<sup>57</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 418

<sup>58</sup> M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Muhammad Afif, 136

1. Masa anak kecil, yaitu masa sejak anak dilahirkan sampai anak berumur antara tujuh dan sembilan tahun terserah pada pengasuh untuk menetapkan batas-batas umur itu. Pada masa ini anak belum dapat mengurus dirinya sendiri. Ia memerlukan pelayanan, penjagaan, dan didikan dari pengasuhnya. Pada masa ini kepada anak telah ditanamkan kepercayaan dan kecintaan kepada Allah sesuai dengan kemampuannya sebagai anak-anak.<sup>59</sup>
2. Masa kanak-kanak. Masa ini dimulai sejak anak berumur tujuh atau sembilan tahun dan berakhir pada waktu anak berumur sembilan atau sebelas tahun. Pada masa ini anak-anak telah mulai dapat mengurus dirinya sendiri, telah mulai mencari teman dan pada umumnya masak untuk bersekolah. Karena itu ia telah boleh memilih pengasuh yang ia sukai di antara pengasuhnya yang ada.<sup>60</sup>

Apabila masa pengasuhan di atas telah berlalu, maka orang tua hendaknya mempertimbangkan bentuk-bentuk pengasuhan lain yang diperlukan oleh anak-anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.

---

<sup>59</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 146

<sup>60</sup> *Ibid.*, 147



## **BAB III**

### **PUTUSAN PA SURABAYA DAN PTA SURABAYA MENGENAI HAK ASUH ANAK**

#### **A. Deskripsi Perkara Dalam Putusan PA Surabaya**

##### **1. Duduk Perkara**

Kasus yang terdaftar pada PA Surabaya dengan nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby, pada dasarnya adalah kasus cerai gugat, yang dalam petitum gugatannya melingkupi hak asuh anak, yaitu antara Heny Anita Sari, SE, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di Simo Rukun VIII/20, RT 06 RW 12, kelurahan Simo Mulyo, kecamatan Sukomanunggal, kota Surabaya, sebagai “Penggugat” melawan Doni Teguh Irwanto, SE., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Simowalang 2/15, RT 01 RW 01, kelurahan Simowalang, kecamatan Simokerto, kota Surabaya, sebagai “Tergugat”.<sup>1</sup>

Berdasarkan gugatan Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2009, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Penggugat mengemukakan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2005. Selama pernikahan sampai bulan

---

<sup>1</sup> Salinan Putusan Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby, 1

Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak tiga kali. Penggugat berpendapat bahwa sejak awal pernikahannya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak, serta sering berkata tidak patut dan melakukan kekerasan fisik. Kemudian puncaknya pada bulan Oktober 2009 Tergugat telah mengambil barang-barangnya dan meminta kembali barang lamaran yang telah diberikannya kepada Penggugat.<sup>2</sup>

Dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu Azzalia Jasmine Irania Putri, lahir di Surabaya tanggal 02 April 2006. Dikarenakan anak tersebut masih tergolong anak-anak dan belum *mumayyiz*, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar pihak Penggugat mendapatkan hak asuh anak (*Haḍānah*) tersebut. Dan menghukum pihak Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).<sup>3</sup>

Mengenai perkara ini majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang telah dilakukan juga gagal mendamaikan para pihak, dan para pihak tetap dipertahankan oleh Penggugat. Adapun untuk menguatkan dalil

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 2-3

<sup>3</sup> *Ibid.*, 3-4

penggugat, melalui replik yang diajukan penggugat berpendapat bahwa pada saat itu anak telah masuk PAUD Tunas Harapan, dan untuk biaya masuk, daftar ulang, SPP, seragam dan peralatan lainnya, yang membayar Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau tahu hal biaya tersebut, terbukti bahwa Tergugat tidak mau mengeluarkan biaya sama sekali, dan sangat egois. Serta saat mengajak anak Penggugat dan Tergugat, sangat memaksa walaupun anak tersebut tidak mau. Selain itu selama ini anak juga lebih dekat dengan ibu kandungnya yaitu Penggugat.<sup>4</sup>

Berdasarkan replik yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pokoknya adalah menguatkan jawabannya dan membantah replik Penggugat, serta terkait hak asuh anak Tergugat menyampaikan bahwa pada kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini diasuh dan disekolahkan di “TK Taruna Jaya” oleh Tergugat, yang pada prinsipnya Tergugat tetap menolak seluruh gugatan Penggugat. Kemudian dari duplik tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat dan juga dua saksi, yaitu Rumaniah binti Saliman, selaku ibu kandung Penggugat dan Arif Susanto bin Suyitno, yang merupakan adik kandung Penggugat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 10

<sup>5</sup> *Ibid.*, 12-14

## 2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Sesuai pula dengan dalil Penggugat dan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas yang tidak dengan tegas dibantah oleh Tergugat, bisa disimpulkan fakta tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin hari bukannya semakin reda, tetapi menjadi semakin parah, dan tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Majelis hakim berpendapat bahwa cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975), termasuk dalam kategori *syiqāq*, yakni hakim menjatuhkan talak suami terhadap isteri, oleh karena itu sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2000, tanggal 18 Pebruari 2000, petitumnya berbunyi: “Menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat”.<sup>6</sup>

Adapun terkait hak asuh anak, berdasarkan dalil gugatan serta jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan, maka dalam memutuskan perkara tersebut pertimbangan majelis hakim mengacu pada kenyataan yang ada, yang pada mulanya anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun sejak awal maret 2010 sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dibawa oleh Tergugat. Selain itu, tidak terdapat cukup bukti bahwa Penggugat sebagai ibu dalam keadaan cacat fisik atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 15-20

mental dan atau berperilaku menyimpang yang bisa menghalangi tugasnya dalam mengasuh/merawat anak dan bisa menimbulkan pengaruh buruk pada perkembangan kehidupan fisik dan mental anak. Maka sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan demikian Penggugat dipandang layak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, antara lain ditentukan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Kemudian berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, tentang besaran nafkah yang harus ditanggung tersebut disesuaikan dengan kemampuan penghasilannya serta sesuai dengan fakta bahwa Tergugat telah bekerja pada *PT Dovechem Maspion Terminal* dengan penghasilan sekitar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Maka majelis hakim memandang bahwa Tergugat mampu untuk memberi nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 22-23

<sup>8</sup> *Ibid.*, 23

### 3. Putusan Pengadilan

Dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim pengadilan agama Surabaya memutuskan: mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menjatuhkan talak satu *bāin sugrā* dari Tergugat, Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat, dan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 400.000,- sampai anak tersebut dewasa.<sup>9</sup>

#### B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan PTA Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

##### 1. Duduk Perkara

Dari Akta Permohonan Banding Nomor : 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby. tanggal 31 Mei 2010, Pembanding pada tanggal 31 Mei 2010 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 3349/Pdt.G/2010/PA.Sby dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2010. Setelah itu, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2010 dan Terbanding telah pula mengirimkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juli 2010. Kemudian Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2010, sedangkan Terbanding tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 24



melakukan *inzage* meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*.<sup>10</sup>

## 2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

### a. Gugatan Cerai

Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terhadap pertimbangan-pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim dapat menyetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Oleh karena itu putusan mejelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut dapat dipertahankan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Salinan Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby, 1-2

<sup>11</sup> *Ibid.*, 3

## b. Penguasaan Anak

Dalam hal penguasaan anak majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama, dan berpendapat bahwa ibu dan bapak meskipun mereka sudah bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, karena pada dasarnya setiap orang tua apakah itu ibu atau bapak pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>12</sup>

Selain itu, Meskipun secara normatif dengan mengacu pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi yang lebih diprioritaskan adalah hak anak dari pada hak ibu, yaitu kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974.<sup>13</sup>

Kemudian sesuai dengan fakta bahwa selama berada dalam penguasaan pembanding yaitu sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, tidak ternyata kepentingan anak tersebut terabaikan, bahkan sudah disekolahkan di Taman Kanak-kanak (TK) “ TARUNA JAYA”, berarti

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 3-4

<sup>13</sup> *Ibid.*, 4

sudah sesuai dengan kepentingan anak. Dan dari segi pemenuhan kewajiban bapak kepada anak berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak secara langsung dapat terpenuhi sesuai tingkat kebutuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara proporsional.<sup>14</sup>

Majelis hakim juga berpendapat bahwa bagaimanapun penguasaan anak oleh salah satu pihak baik bapak atau ibu sama-sama terdapat kelemahan yang dapat berdampak yang kurang baik bagi anak. Dalam hal ini majelis hakim mengacu pada *Qā'idah Fiqhiyah* dijelaskan: "*Jika bertemu dua kemadlaratan maka hendaklah engkau pilih yang lebih ringan madlaratnya*".<sup>15</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan *Qā'idah Fiqhiyah* tersebut, dari hasil wawancara dengan Drs. Thanthowie Ghanie, SH. MH. Selaku hakim pengadilan tinggi agama, diperoleh informasi bahwa Majelis hakim mempunyai pandangan bahwa keperluan hidup si anak lebih bisa terjamin jika anak tersebut penguasaannya diserahkan kepada Pembanding, karena jika diserahkan kepada Terbanding untuk keperluan hidupnya masih sangat tergantung pada pemberian Pembanding, meskipun mungkin telah ada putusan pengadilan yang mewajibkan kepada Pembanding untuk memberi nafkah setiap bulan. Kelemahannya adalah mengenai kasih

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 4

<sup>15</sup> *Ibid.*, 5

sayang anak kepada ibu tidak dapat tercurahkan setiap hari, akan tetapi mengenai hal ini sepanjang ada iktikat baik dari kedua belah pihak dapat diatur.<sup>16</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lebih baik dan sudah seleyaknya diserahkan kepada Pembanding dengan tanpa mengurangi hak-hak Terbanding untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding agar anak tersebut penguasaannya diserahkan kepada Terbanding, ditolak oleh majelis hakim.<sup>17</sup>

#### c. Biaya Pemeliharaan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal biaya pemeliharaan anak, majelis hakim menyatakan bahwa karena anak Pembanding dan Terbanding penguasaannya diserahkan kepada Tergugat/Pembanding, maka gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak beralasan sehingga gugatannya harus ditolak.<sup>18</sup>

### 3. Putusan Pengadilan

Dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tinggi agama memutuskan: menerima permohonan banding yang diajukan oleh

---

<sup>16</sup> Thanthowie Ghanie, *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2011.

<sup>17</sup> Salinan Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby, 5

<sup>18</sup> *Ibid.*, 5

Tergugat/Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1431 Hijriyah Nomor : 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby. Dengan Mengadili Sendiri, mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian, menjatuhkan talak satu *bāin ṣugrā* Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding.<sup>19</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 6

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA SURABAYA NOMOR: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby DAN PTA SURABAYA NOMOR: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby.**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum dan Putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby**

Dalam hal perceraian, masalah pengasuhan anak sering menjadi sebuah perselisihan antara suami istri, yang pada umumnya berakhir pada penyelesaian di pengadilan agama. Meskipun dalam agama Islam hak untuk mengasuh anak diberikan kepada pihak istri atau ibu, namun dalam keadaan tertentu diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan pengasuhan yang lebih baik dari kedua orang tua, jika telah jelas kemaslahatan anak dalam hal itu. Termasuk bagian hak hakim pada saat terjadi perselisihan dalam pengasuhan anak, memilih orang yang lebih bermanfaat bagi anak dan lebih mampu untuk berbuat baik dalam hal pendidikannya dan melaksanakan pendidikannya.<sup>1</sup>

Dalam perkara mengenai hak asuh anak yang penulis teliti, majelis hakim pengadilan agama Surabaya mengadili dan memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, serta membebaskan biaya pengasuhan kepada Tergugat.

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 286



Putusan Majelis hakim tersebut didasarkan pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Majelis hakim juga mengacu pada pertimbangan bahwa secara biologis tidak bisa dipungkiri, dalam keadaan normal peran ibu sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan seorang anak, dan juga faktanya, pada mulanya anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun sejak awal maret 2010 sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dibawa oleh Tergugat. Selain itu, tidak terdapat cukup bukti bahwa Penggugat sebagai ibu dalam keadaan cacat fisik atau mental dan atau berperilaku menyimpang yang bisa menghalangi tugasnya dalam mengasuh/merawat anak dan bisa menimbulkan pengaruh buruk pada perkembangan kehidupan fisik dan mental anak.

Dari pertimbangan tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara mengenai hak asuh anak, majelis hakim pengadilan agama Surabaya telah tepat dan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Islam. Majelis hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibunya dengan memperhatikan kondisi anak yang belum *mumayyiz*, yaitu baru berumur 4 (empat) tahun yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu dalam kesehariannya.

Majelis hakim juga memperhatikan sisi kemaslahatan anak dari segi jasmani maupun rohani, yang mencakup pendidikan, kesehatan, perhatian dan

belaian kasih sayang orang tua dalam masa pertumbuhannya, yang sangat mempengaruhi kehidupan di masa depannya kelak. Pertimbangan majelis hakim ini sesuai dengan *hadis* Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي .

*“Abdullah bin Amr berkata bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, anak yang masih berumur 4 tahun atau masih dalam tahap balita, sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tua. Untuk itu, seharusnya orang tua lebih bisa meluangkan banyak waktu untuk menjaga, merawat dan memantau pertumbuhan anak secara intensif. Begitu halnya dalam perkara ini majelis hakim telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, karena sesuai dengan fakta dari bukti-bukti dalam persidangan, Penggugat lebih mempunyai banyak waktu luang jika dibandingkan dengan Tergugat selaku ayah, yang bekerja sebagai pegawai *PT Dovechem Maspion Terminal*.

Adapun dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim juga telah tepat dan benar, yaitu Pasal 41 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan:

#### Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Selain itu majelis hakim pengadilan agama Surabaya juga mendasarkan

putusannya pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

#### Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dapat dipahami dalam Pasal 105 tersebut disebutkan bahwa ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian oleh ibu, namun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian.

Terkait dengan pembiayaan *ḥaḍānah*, berdasarkan dasar hukum tersebut, dan sesuai pada fakta bahwa Tergugat telah bekerja pada *PT Dovechem Maspion Terminal* dengan penghasilan sekitar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, maka majelis hakim telah tepat dengan memutuskan Tergugat untuk memberi nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum dan Putusan PTA Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby**

Perkara yang telah diputus pengadilan agama Surabaya, selanjutnya diajukan banding oleh Tergugat pada pengadilan tinggi agama Surabaya dengan nomor: 229/pdt.G/2010/PTA.Sby. Dari perkara tersebut, majelis hakim pengadilan tinggi agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dengan mengadili sendiri yang intinya membatalkan putusan pengadilan agama surabaya dan memberikan hak asuh anak kepada pihak Pembanding/Tergugat.

Pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi agama tersebut didasarkan pada pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa meskipun secara normatif dengan mengacu pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi yang lebih diprioritaskan adalah hak anak dari pada hak ibu, yaitu kepentingan anak itu sendiri, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan, “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak”.

Selain dasar hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan kondisi anak yang sejak bulan Maret 2010 sudah berada dalam penguasaan Pembanding, dan bahkan sudah disekolahkan di Taman Kanak-kanak (TK) “TARUNA JAYA”. Hal ini berarti sudah sesuai dengan kepentingan anak. Kemudian jika anak tersebut penguasaannya diserahkan kepada Pembanding keperluan hidupnya lebih bisa dijamin daripada diserahkan kepada Terbanding, karena jika diserahkan kepada Terbanding untuk keperluan hidupnya masih sangat tergantung pada pemberian Pembanding meskipun mungkin telah ada putusan pengadilan yang mewajibkan kepada Pembanding untuk memberi nafkah setiap bulan.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut kiranya telah sesuai dengan dasar hukum yang ada, yaitu bahwa setelah terjadinya

perceraian, baik ibu dan ayah berkewajiban untuk mengasuh anak, dan dalam pengasuhan tersebut haruslah lebih memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan anak. Namun peneliti berpendapat, pertimbangan majelis hakim kurang tepat jika hal tersebut dijadikan alasan serta acuan untuk memutuskan dan memberikan hak asuh anak kepada pihak Pembanding/Tergugat dalam perkara ini.

Terdapat beberapa hal yang seharusnya dikaji lebih dalam lagi untuk dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam mengadili perkara ini.

*Pertama*, kedekatan ibu dengan anak. Dari bukti dan fakta yang telah dijelaskan dalam persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya lebih dekat dengan anak jika dibandingkan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam, bahwa kedekatan ibu dan anak merupakan salah satu alasan mengapa ibu lebih diprioritaskan dalam pengasuhan anak dari pada ayah. Hal ini juga dikarenakan secara biologis tidak bisa dipungkiri, dalam keadaan normal peran ibu sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan seorang anak yang belum *mumayyiz* dalam kesehariaannya, meliputi mandi, makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya. Dari beberapa hal tersebutlah kemudian Islam memandang lebih terdapat kemaslahatan bagi si anak jika anak tersebut di bawah asuhan ibu, dengan syarat ibu tidak memiliki sifat-sifat buruk, serta belum menikah lagi (dengan laki-laki lain).



Kemudian pendapat hakim yang menganggap bahwa anak sudah terbiasa tinggal bersama ayah dan kebutuhan anak sudah terpenuhi, hal ini juga kiranya perlu pertimbangan lagi, karena dari bukti yang diajukan anak baru tinggal bersama ayah pada bulan Maret 2009, sedangkan sebelumnya anak sudah tinggal bersama ibu dan sudah disekolahkan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

*Kedua*, pendidikan anak. Dalam masalah ini pendidikan yang dimaksud bukan hanya mencakup pendidikan formal saja, akan tetapi yang lebih penting dan harus diperhatikan adalah pendidikan anak di luar sekolah, dan hal ini erat kaitannya dengan berapa banyak waktu yang bisa diluangkan orang tua pengasuh untuk si anak. Dalam usia dini seorang anak sangat membutuhkan bantuan dan pengawasan orang tua dalam kesehariannya, oleh sebab itu seharusnya orang tua lebih bisa meluangkan banyak waktu untuk menjaga, merawat dan memantau pertumbuhan serta memberikan pendidikan kepada anak secara intensif.

Putusan majelis hakim yang menetapkan pengasuhan anak kepada Pembanding/Tergugat selaku ayah dalam hal ini kurang begitu tepat, karena dari fakta yang dijadikan bukti dalam persidangan, Pembanding telah bekerja di *PT Dovechem Maspion Terminal*, ini menunjukkan bahwa waktu yang diluangkan oleh Pembanding lebih sedikit jika dibandingkan Terbanding.

*Ketiga*, pembiayaan *ḥaḍānah*. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini salah satunya dengan menggunakan alasan pembiayaan kehidupan anak lebih terjamin jika anak dalam pengasuhan Pembanding, karena secara langsung bisa terpenuhi, dibandingkan dengan Terbando yang masih menggantungkan pemberian Pembando. Menurut pendapat penulis, alasan tersebut kurang begitu tepat, karena dalam pasal 105 KHI huruf (c) telah dijelaskan bahwa meskipun pengasuhan anak berada di tangan ibu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, yang dilaksanakan setiap bulan untuk kebutuhan anak. Kemudian dari pertimbangan hakim tersebut timbul satu persoalan tentang pembiayaan *ḥaḍānah*, dari pertimbangan tersebut menurut digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pendapat penulis, majelis hakim seakan-akan mengkhawatirkan tidak terlaksananya pembiayaan *ḥaḍānah* oleh pihak ayah secara baik dan maksimal. Hal inilah yang seharusnya menjadi tugas baik pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama untuk dapat mengawal dan memastikan pembiayaan oleh pihak ayah dapat berjalan secara berkelanjutan sampai anak *mumayyiz*.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby Oleh PTA Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak

Permasalahan *ḥaḍānah* telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum islam yang menjadi acuan seorang hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara perebutan hak pengasuhan anak antara suami dan

isteri. Namun, dalam menangani perkara tersebut majelis hakim harus mempertimbangkan *moral justice*, *legal justice* serta pertimbangan keadilan lain secara *komprehensif*, diantaranya adalah pertimbangan sisi masalah bagi bapak dan ibu tersebut, serta masalah bagi anak untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Senada dengan hal tersebut, *Wahbah az-Zuhailiy* berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* itu adalah hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.

Pembatalan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap Pengadilan Agama Surabaya mengenai hak asuh anak sebagaimana yang telah digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id diuraikan diatas, tentunya menarik untuk dikaji lebih dalam. Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menetapkan hak asuh anak kepada Pembanding/Tergugat selaku ayah kandung si anak, seharusnya mempertimbangkan lebih jauh lagi terkait dengan kondisi yang menyangkut kemaslahatan si anak, bukan hanya melihat kondisi si anak, akan tetapi juga yang terpenting adalah kondisi pengasuh yang selanjutnya akan mengasuh anak tersebut. Dalam masalah ini Islam telah memberikan perhatian khusus dengan memberikan persyaratan yang ketat bagi para pemegang *ḥaḍānah*, hal ini semata-mata untuk kemaslahatan dan masa depan anak. Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilaksanakannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berfikir sehat. Orang yang kurang akalunya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk juga tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Jika diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini adalah *fāsiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.
5. Tidak terikat dalam suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍānah* dengan baik. seperti *ḥāḍin* terikat dengan pekerjaan yang jauh tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya untuk bekerja, karena hal itu akan menyebabkan kurangnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak.

6. Tidak membenci si anak. Jika *ḥādīn* membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan, sebab yang penting dalam *ḥadānah* ialah *ḥādīn* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya.
7. Sanggup melaksanakan pengasuhan anak. Yang dimaksud dengan kesanggupan dalam hal ini bukanlah kesanggupan dengan arti keahlian, tetapi kesanggupan dalam arti adanya kemampuan pengasuh untuk menjadikan anak asuhnya sebagai muslim dan berpendidikan, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial

Majelis hakim pengadilan tinggi agama dalam menetapkan pengasuhan anak kepada pihak ayah sebenarnya bukan merupakan hal yang salah, karena Islam lebih menekankan sisi manfaat dan kemaslahatan si anak. Islam lebih memprioritaskan ibu dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* tidak lain dikarenakan alasan bahwa ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang masih kecil, seorang anak lebih membutuhkan perhatian dan sentuhan kasih sayang.

Memperhatikan hal tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama seharusnya melihat kondisi dari kedua orang tua anak, yang dalam perkara ini adalah Pembanding/Tergugat selaku ayah kandungnya dan Terbanding/Penggugat selaku ibu kandungnya. Kemudian dari keduanya tersebut dipertimbangkan manakah yang lebih memenuhi syarat-syarat untuk

menjadi seorang pengasuh bagi anaknya, dengan tidak mengabaikan Kompilasi Hukum Islam bahwa ibu lebih mempunyai prioritas daripada ayah, selama ibu belum menikah lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh *Ahmad, Abu Daud dan Bayhaqiy*, serta disahkan oleh *Hakim*. “Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Ayahnya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum kawin (dengan laki-laki yang lain).”

Telah jelas kiranya bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim pengadilan tinggi agama kurang tepat dalam hal ini, karena dari fakta dan beberapa bukti yang diajukan di persidangan, ternyata Terbanding/Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memiliki kelakuan yang buruk, dan Terbanding/Tergugat juga belum menikah lagi. Sedangkan sebaliknya Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya, dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama terbukti mempunyai kelakuan yang kasar. Dari hal tersebut, jika mendasarkan pada hukum Islam, maka Terbanding/Penggugat selaku ibu kandungnya si anak yang berhak atas *ḥadānah* dari pada ayah.

Kasih sayang ibu yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak tentunya menjadi suatu hal yang harus diperhatikan majelis hakim sebelum akhirnya memberikan hak pengasuhan anak kepada Pembanding/Tergugat selaku ayah,



karena meskipun hakim mengizinkan ibu atau Terbanding untuk mengunjungi si anak setiap saat, namun sedikit banyak hal tersebut akan mengurangi curahan kasih sayang ibu kepada anaknya, serta menjauhkan ibu dengan anaknya. Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat”.*

Selain itu, majelis hakim seharusnya mendasarkan pertimbangannya pada urutan orang-orang pemegang *ḥaḍānah*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby mengenai hak asuh anak, pengadilan agama surabaya menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh si anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak lebih dekat dengan Penggugat/ibu dari pada Tergugat/ayah, serta anak lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dari pertimbangan tersebut, dalam memutus perkara majelis hakim mengacu pada ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
2. Pertimbangan Majelis hakim pengadilan tinggi agama Surabaya dalam putusan Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang menetapkan hak asuh anak kepada Pembanding/Tergugat selaku ayah kandung si anak, sekaligus membatalkan putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby, adalah karena anak telah berada dalam pengasuhan Pembanding/Tergugat sejak 09 maret 2009 (selama 3 bulan), dan tidak terbukti kepentingan anak terabaikan, yang dalam hal ini adalah pendidikan formal. Pertimbangan

tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan anak.

3. Pada perkara nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby, Majelis Hakim PTA Surabaya memutuskan hak asuh anak kepada Pembanding/Tergugat selaku ayah kandungnya. Dalam membatalkan putusan PA Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby, pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim PTA Surabaya kurang begitu tepat, dikarenakan kurangnya memperhatikan beberapa hal termasuk pentingnya peran *ḥaḍīn*, yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan anak. Mengingat ibu dari si anak telah memenuhi syarat-syarat pemegang *ḥaḍānah*, serta mempunyai prioritas dalam urutan para pemegang *ḥaḍānah*, maka sudah selayaknya Terbanding/Penggugat selaku ibu kandungnyalah yang berhak untuk mengasuh si anak.

## B. Saran

Dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat

membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Bagi kedua orangtua yang melakukan perceraian, hendaknya perebutan hak asuh anak ini harus dihindari, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dari anak. Kedua orang tua seharusnya memahami bahwa pengasuhan semata-mata dilakukan demi kepentingan dan masa depan anak mereka sendiri, agar tidak ada lagi perebutan hak asuh anak dan juga tidak ada lagi kepentingan anak yang terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu 'Isa Muhammad bin Saurah at-Tirmiziy, *Sunan Tirmiziy*, Juz III, Semarang, Toha Putra, tt

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraissy an-Naisāburiy, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz III, Dahlan, Indonesia, tt.

-----, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz III, Dahlan, Indonesia, tt.

Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990

Ahmad Abdul Salam, *Studi Analisis Madzhab Syafi'i Terhadap Putusan PTA No. 196/Pdt.G/2006/PTA Surabaya Tentang Perbedaan Domisili Mengenai Hak Asuh Anak*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Nur Khozin, Jakarta, Amzah, 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

As-Shan'ani, *Terjemahan Subulu al-Salām*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad. Jilid III, Surabaya, al-Ikhlās, 1995

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2011.

*Fathul Qarib*, Jilid II, Penerjemah Imron Abu Amar, Kudus, Menara Kudus, 1984

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008.

Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād fī hudā khair al-'Ibād*, Kairo, Muhammad Ali ṣābiḥ al-Qāhirah, TT

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani, 2007

Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 2004.

Lis Chamidah, *Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding; Studi Kasus di PA Gresik*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003

M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Muhammad Afif, Jakarta, Lentera, 2008

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, Ed.II, Cet.IV, 2007.

Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung, CV. Diponegoro, 1991

Muhammad Syaikhon, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Surabaya dan PTA Jatim dalam Perkara Hak Asuh Anak*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

Pasha, Musthafa Kamal Dkk, *Fikih Islam*, Jogjakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002

S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008

Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (hukum perkawinan Islam)*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya, Khalista, 2010

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II Al-Qāhirah, Dār al-Fath al-I'lam al-Arabiyy, 1990.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999



Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994

Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, Beirut, Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1996.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah Abdul Ghofar, Cet. 24, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2007

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pres, 2009

Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqhu al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu*, Juz X, Damaskus, Dār al-Fikr, 1997

Yusuf Chudrori, *Baiti Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah*, Surabaya, Khalista, 2009

---

## Kompilasi Hukum Islam

Salinan Putusan Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby

Salinan Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Thanthowie Ghanie, *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2011

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan